

# Pertanggungjawaban Child Grooming ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*by Andiani Aisyah*

---

**Submission date:** 25-Oct-2023 04:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2206738315

**File name:** Hukum\_1312000023\_Andiani\_Aisyah.docx (39.17K)

**Word count:** 2804

**Character count:** 18155

<sup>6</sup>  
**Pertanggungjawaban *Child Grooming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

<sup>2</sup>  
**Andiani Aisyah, Adianto Mardijono**  
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: [andianiaisyah@gmail.com](mailto:andianiaisyah@gmail.com)

**Abstrak**

*Child Grooming* mempunyai pengertian sebuah proses untuk mendekati seorang anak dengan membangun kepercayaan serta keharmonisan yang berujung dengan kekerasan seksual secara *virtual*, istilah *Child Grooming* sendiri bermunculan saat pandemi *covid-19* dan seiring tahun kekerasan seksual yang terjadi kepada anak juga semakin meningkat. Kekerasan seksual sendiri diatur dalam <sup>11</sup> UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian dalam Undang-undang tersebut masih memiliki multitafsir serta tidak memberikan spesifik dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku *Child Grooming* sehingga para pelaku masih berkeliaran menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Child Grooming*, Kekerasan Seksual, Anak

**Abstract**

Child Grooming means a process of approaching a child by building trust and harmony which ends in virtual sexual violence. The term Child Grooming itself emerged <sup>28</sup> during the Covid-19 pandemic and over the years sexual violence against children has also increased. Sexual violence itself is regulated in Law Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 <sup>9</sup> concerning Information and Electronic Transactions, however, this Law still has multiple interpretations and does not provide specific responsibilities for perpetrators of Child Grooming so that The perpetrator is still at large making children victims of sexual violence.

**Keywords:** Child Grooming, Sexual Violence, Children

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk tindakan fisik yang tergolong dalam kategori kejahatan. Para pelaku kekerasan seksual bertujuan memaksa orang lain untuk memuaskan nafsu seksual mereka dengan cara yang tidak diinginkan. Ini tidak hanya melibatkan tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, tetapi juga mencakup perilaku lain, seperti perilaku tidak senonoh, atau bahkan hanya pengawasan, seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Psikologi *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children* oleh Orange dan Brodwin. Mereka menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak melibatkan pemaksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual ini mencakup pengawasan, sentuhan, penetrasi paksa, pencabulan, dan pemerkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak fisik, psikologis, dan sosial. Dampak fisik meliputi cedera atau kerusakan pada selaput dara. Dampak psikologis mencakup trauma mental, ketakutan, rasa malu, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Dampak sosial melibatkan perlakuan merendahkan dari masyarakat sekitar, ketakutan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan lain sebagainya (Sari and others [n.d.]).

*Child Grooming* sendiri adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dalam Undang-undang usia anak yakni dalam kandungan sampai dengan sebelum umur 18 tahun, dalam *Child Grooming* seorang pelaku akan melayangkan rayuan dan gombalan hingga seorang anak akan menaruh sebuah kepercayaan yang menjadikan seorang anak akan patuh terhadap perintah yang diberikan pelaku. *Child Grooming* mungkin menjadi satu-satunya tindak kekerasan yang memakan banyak waktu untuk membangun kepercayaan yang baik pada seorang anak.

Kasus yang banyak terjadi *Child Grooming* menjadikan kepercayaan jalan satu-satunya untuk mendapatkan apa yang ingin di perbuat pelaku kejahatan seksual. Mula-mula dengan pendekatan seorang korban akan diperhatikan, dimanja, didukung, diberi masukan, diberi *gift* (diberi hadiah) setelah pendekatan berhasil kebanyakan dari pelaku tidak langsung pada topik apa yang dia inginkan. Melainkan dengan memberikan *respons* tarik ulur, di mana jika seorang korban atau anak yang sudah terlanjur nyaman kepada pelaku, seorang pelaku akan melancarkan aksinya menghilang tanpa kabar agar membuat seorang anak tersebut merasa kehilangan dan merasa dirinya kurang. Setelah rasa hilang dan rasa bersalah, aksi seorang pelaku akan dilanjutkan dengan menggunakan perintah-perintah untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu.

Berawal hal-hal kecil untuk membatasi bermain dengan teman sebayanya, dan pelan-pelan membatasi kehidupan anak tersebut. Dan setelah anak tersebut melakukan dan

membatasi dirinya atau menarik dirinya dari teman-teman sebayanya, aksi pelaku sudah berhasil membuka peluang-peluang untuk melancarkan aksinya. Setelah semua terpenuhi dari unsur mendapatkan kepercayaan seorang anak, menjadikan anak candu padanya, aksi yang terakhir yang dilakukan adalah memberikan perintah untuk melakukan adegan dan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Anak diberikan contoh atau langsung dipandu untuk melakukan adegan dewasa seperti memperlihatkan alat vital, berdesah layaknya berhubungan, memberikan video-video untuk ditonton bersama.

Perintah tersebut akan dilancarkan oleh pelaku dari segi mana saja, sekali saja anak memberikan apa yang diminta oleh sang pelaku. Selanjutnya akan meminta korban untuk melakukan adegan atau perintah yang diminta jika anak sudah mulai menolak dan memberontak. Di situ awal mulanya ancaman-ancaman akan terlontar dari ketidakpatuhan atas perintah menjadi ancaman untuk menyebarluaskan gambar atau desahan anak tersebut, kebanyakan dari pelaku akan mengancam untuk menyebarluaskan kepada teman-temannya dan memberikan ancaman jika tidak melakukan hal yang diminta mungkin nyawanya juga akan terancam.

Semua ancaman terlontarkan hingga menjadi seorang anak malu, tertekan, dan merasa terintimidasi. Tekanan psikis anak akan mulai berat dan memberikan efek yang tidak seharusnya di rasakan, beberapa dampak dari anak yang sudah masuk pada *Child Grooming* adalah:

1. Cenderung menutup diri, dari anak yang senang terhadap permainan atau dari seorang anak yang *hiperaktif* karena ancaman atau tekanan yang diberikan seorang pelaku pelecehan seksual akan menjadikan anak merasa tertekan dan enggan untuk berbicara atau mengutarakan isi hati.
2. Cemas, tidak bisa dipungkiri seorang anak yang sudah terkena ancaman dan tekanan dari seorang pelaku pelecehan seksual akan merasa dan tidak nyaman di lingkungan barunya, atau lingkungan yang sekarang ia rasakan. Rasa cemas dan rasa takut akan terus menjalar dalam pikirannya dan terus mengingat ancaman-ancaman yang akan membatasi gerak anak tersebut.
3. Tidak Mudah Percaya, harusnya sikap seperti ini akan sangat baik bagi anak yang belum terkena *Child Grooming*. Tapi jika anak sudah terkena *Child Grooming* anak akan merasa semua orang terdekatnya tidak bisa dipercaya dan akan menjadikan anak tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi saat ini.
4. Gangguan perilaku, jika seorang anak sudah terkena *Child Grooming* emosi yang keluar dari seorang anak sangat-sangat beda, dan terkesan hanya kedua orang tuanya

yang tahu perbedaan yang mana membuat seorang anak merasa berbeda. Kenapa anak tersebut sampai meledak-meledak karena dia merasa di bawah ancaman dan tidak menajadi dirinya sendiri saat ini.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) terdapat adanya norma kabur atau multitafsir mengenai “melanggar kesusilaan.” Apakah *Child Grooming* termasuk dalam melanggar kesusilaan yang pada penjelasan Undang-Undang tersebut tidak memberikan kejelasan secara spesifik tentang melanggar kesusilaan itu sendiri. Karena itulah jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban *Child Grooming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Yang bertujuan untuk mencari tahu dan menjawab masalah-masalah rumusan masalah pada penelitian ini.

## RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertanggungjawaban *Child Grooming* ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengetahui dan menjelaskan apakah *Child Grooming* termasuk dari unsur melanggar kesusilaan yang dimaksud kan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berdasarkan Undang-undang, doktrin, dan aturan hukum yang telah berlaku. Dalam penelitian hukum normatif juga dapat menambah dan melengkapi penelitian terdahulu dengan menguraikan rumusan masalah yang berpatokan dalam hukum yang berlaku serta melakukan pendekatan terhadap Undang-undang yang memiliki artian argumentasi atau sebuah analisis yang akan diberikan sesuai dengan Undang-undang yang berjalan dan masih berlaku dan memiliki dasar yang kuat untuk menguraikan isu yang kan dibahas. Serta pendekatan konsep yang memiliki artian bahwa dalam memecahkan isu yang akan dibahas ini akan menggunakan

yang doktrin dan pemikiran para ahli serta perkembangan ilmu yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

## PEMBAHASAN

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008<sup>3</sup> tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, terlebih lagi UU ITE<sup>27</sup> dibentuk untuk mengatur dan bagaimana larangan dan peraturan untuk bermain di dalam dunia maya, atau yang biasa disebut dengan semua aktivitas dalam dunia internet. Tidak bisa dipungkiri UU ITE sendiri baru disahkan tahun 2008 dan diperbarui tahun 2016, jadi untuk peraturan-peraturan beberapa masih memiliki multitafsir atau yang dikatakan bermakna ganda.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (1) yang menetapkan “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” Dalam pasal tersebut memiliki multitafsir dari kata-kata “melanggar kesusilaan” dan “muatan” dari kata-kata tersebut banyak yang memiliki prefektif masing-masing. Jika menarik benang merah “melanggar kesusilaan”<sup>18</sup> dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*”

Hubungan antara Undang-undang<sup>24</sup> ITE dan Undang-undang Pornografi ibaratkan Undang-undang ITE adalah wadahnya dan Undang-undang Pornografi adalah isi spesifik dari Undang-undang ITE tersebut. Begitu juga dengan “melanggar kesusilaan”, walaupun dalam Undang-undang sendiri tidak memiliki spesifik dari apa yang dimaksud dari melanggar kesusilaan banyak yang berpedoman bahwasanya melanggar kesusilaan adalah suatu norma kesopanan yang ada dalam masyarakat. Norma kesopanan itu sendiri menjadi patokan terhadap apa yang dimaksud dari melanggar kesusilaan itu sendiri, dan dalam norma kesopanan itu sendiri juga memiliki artian yang banyak apalagi Indonesia memiliki banyak suku, ras, budaya yang ada dalam Indonesia. Terkadang norma kesopanan juga menjadi pemikiran sendiri dari

suku, ras, budaya sesuai dengan apa kebiasaan dari setiap masing-masing suku dan ras yang ada dalam Indonesia.

Perbedaan yang ada dalam Indonesia juga harus memiliki patokan terhadap apa yang dimaksud dari norma kesopanan itu sendiri dan norma kesopanan adalah sebuah aturan yang memiliki nilai-nilai sosial yang mengatur dan memberikan batasan bagaimana cara berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat. Dari pengertian norma kesopanan itu sendiri menarik benang lurus bahwasanya dalam melanggar kesusilaan sesuai dengan norma kesopanan sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri, jadi dalam Undang-undang ITE pada pasal 27 ayat (1) melanggar kesusilaan adalah melanggar norma kesopanan yang ada pada masyarakat.

Undang-undang ITE dan pornografi menjadi landasan dalam melihat dan bagaimana *Child Grooming* menjadi unsur tindak pidana dari *Child Grooming* sendiri memiliki proses melibatkan, membiarkan, memanfaatkan, membujuk, mengajak, dan mempertontonkan, atau mengunduh konten dari aplikasi yang dipergunakan pelaku *Child Grooming* sendiri. Dari penelitian ini anak menjadi subjek hukum yang memiliki hukum khusus dalam hukum politik, serta subjek anak sangat-sangat dilindungi atau hak-haknya, atas semua keamanan anak dan semua keselamatan yang tumbuh dan berkembang. Undang-undang Pelindungan Anak dapat diartikan sebagai Undang-undang yang dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang sama-sama mengatur dan memberikan sanksi untuk melindungi dan membahas tentang seorang anak yang sudah diatur dalam pasal 63 KUHP.

“*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” dapat mengatasi sebuah konflik antara Undang-undang yang membahas lebih luas dan spesifik dalam pengaturan Undang-undang yang lebih sempit dalam membahas pengaturannya. Salah satu bentuk pemerintahan untuk melindungi seorang anak, pelaku *Child Grooming* dapat memberikan perintah-perintah terhadap korbannya dengan menyuruh dari hal-hal terkecil dahulu, dari menonton, memberikan stiker, memberikan video. Hal-hal kecil tersebut akan menjadi luas jika korban memberikan ruangan dan terus mematuhi perintah sang pelaku, berawal dari pelaku memberikan perintah dan selalu dilihat oleh seorang anak akan merembet untuk menjalankan hal-hal yang disetujui dengan apa yang dikirimkan. Dengan memberikan gambar yang berisikan alat vital sudah menjadi salah satu kekerasan seksual dalam dunia maya.

Penyebaran pelaku *Child Grooming* begitu luas dengan timbul-timbulnya kejahatan seksual yang beraneka ragam, Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi juga hanya

sebatas pelindung yang akan melindungi korban jika terkena kejahatan seksual, tetapi dalam realitasnya kejahatan seksual anak atau yang bisa disebut dengan *Child Grooming*. *Child Grooming* sendiri tidak bisa ditindak dengan tegas karena seorang anak sendiri terkadang enggan untuk memberikan atau takut untuk memberikan informasi yang terjadi pada dirinya, dalam hal ini hanya orang tua korban yang dapat melaporkan dan memberikan ketegasan terhadap apa yang terjadi pada anaknya sendiri.

Spesifik dari *Child Grooming* sendiri adalah di saat seorang anak memang candu terhadap pelaku karena pelaku berawal dari perhatian dan dapat menjadi teman berbicara, di saat anak sudah percaya prosedur *Child Grooming* seorang pelaku akan melakukan hal tarik ulur di mana seorang anak akan merasa ditinggalkan karena hal-hal tidak dilakukan anak tersebut. Dengan begitu anak akan terus mengejar hingga bersama pelaku, begitu hingga seorang pelaku meminta seorang anak untuk melakukan kejadian yang tidak seharusnya dilakukan. Jika seorang anak tidak memberikan apa yang mau pelaku, seorang pelaku akan berpura-pura untuk menyebarluaskan atau mengancam anak untuk agar tunduk dan patuh terhadap apa yang dibicarakan.

Tidak dipungkiri anak sangat rentan terhadap namanya ancaman hanya dengan pelaku mengungkapkan bahwasanya dia mengetahui lokasi atau tempat dia bersekolah atau hanya sekedar ancaman akan menjadi pedang tersendiri bagi seorang anak yang menjadikan seorang anak akan merasa berada pada tekanan yang sedang ia lakukan. Dalam seperti ini tidak ada yang namanya peraturan atau Undang-undang yang dapat melindungi anak untuk mengawasi anak dari ancaman yang terjadi pada dirinya. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasanya tindak *cyber seks* adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Unsur-unsur yang ada dalam Undang-undang sendiri antara lain menghasilkan, menciptakan, menyalin, meniru, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang mencakup adegan seksual, kekerasan seksual, tindakan masturbasi, ketelanjangan, organ kelamin, atau materi pornografi yang melibatkan anak. *Child Grooming* sudah memiliki unsur yang menjadikan *Child Grooming* dapat dikatakan dengan pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai subjek yang ada di dalam kekerasan tersebut.

Orang yang terlibat dalam tindakan *Child Grooming* akan menghadapi sanksi yang sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang mealukan atau



membiarkan tindakan cabul dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun. Demikian pula, Pasal 290 (2) KUHP mengatur hukuman penjara maksimal tujuh tahun, Pasal 293 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa menggerakkan seorang anak dapat berujung pada pidana penjara maksimal lima tahun, dan sesuai dengan Pasal 81 (2) UUPA, penipuan bisa berakibat pada hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, ditambah denda sebesar Rp 300.000.000,00 hingga Rp 60.000.000,00

Demikian juga, sesuai dengan hukum tentang Pornografi, jika seseorang terlibat dalam *Child Grooming*, mereka akan dikenai hukuman yang diatur dalam Undang-undang Pornografi. Pasal 32 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa orang yang mempertontonkan materi pornografi dapat dikenai hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebanyak dua miliar rupiah. Selain itu, Pasal 35 Undang-undang Pornografi menetapkan hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal dua belas tahun, serta denda minimal lima ratus juta rupiah hingga enam miliar rupiah. Selanjutnya, menurut Pasal 37, setiap orang yang melibatkan anak dalam perbuatan tersebut akan dikenai penambahan hukuman sebesar sepertiga dari hukuman maksimum yang diancamkan.

Menurut hukum, pelaku *Child Grooming* juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang pelecehan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur bahwa tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat mengakibatkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda hingga dua ratus juta rupiah. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dikenai hukuman penjara selama enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Sudah sangat jelas pelaku *Child Grooming* bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya dalam konteks ini pelaku *Child Grooming* akan mendapatkan apa yang diperbuat setelah melakukan kekerasan seksual pada anak, walaupun berawal dari ketidaksengajaan atau penyimpangan nafsu yang terjadi pada orang dewasa tersebut tidak dan jangan sampai seorang anak menjadi pelampiasannya. Pada dasarnya anak akan menjadi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan akan meneruskan perjuangan negara, jika seorang anak sendiri melakukan dan merasakan hal yang seharusnya tidak di rasakan akan mendapatkan tekanan batin dan mental atas segala yang terjadi pada dirinya kelak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Pelindungan anak, Undang-undang Kekerasan seksual dan yang terakhir Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berupaya

untuk melindungi dan memberikan kenyamanan terhadap bermasyarakat tetapi pada Undang-undang itu sendiri tidak memiliki ketegasan terhadap pelaku yang terjadi di jejaring internet terlebih lagi harusnya pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ada yang namanya Cyber khusus untuk mendeteksi akan kejahatan yang dilakukan orang-orang pada aplikasi atau sosial media di dalamnya.

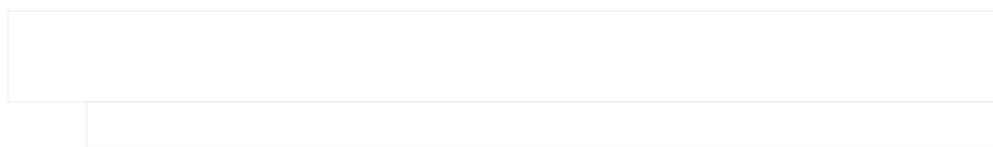
Adanya multitafsir pada Undang-undang ITE tidak menjadi masalah yang tidak bisa diatasi pada dasarnya pada UU ITE juga saling berkesinambungan terhadap Undang-undang Kekerasan Seksual dan Undang-undang Pornografi jika salah satu Undang-undang tidak bisa menjadi payung terhadap kekerasan yang terjadi, tetapi Undang-undang lain yang dapat melengkapi apa yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya jika seorang anak menjadi subjek dalam perkara tersebut, anak tersebut masih memiliki Undang-undang Pelindungan Anak dalam perkaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang menjadi korban akan mendapatkan pelindungan sepenuhnya terhadap hak-hak untuk hidup dan berkembang.

## **PENUTUP**

Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus pelecehan seksual dan memiliki banyak faktor yakni faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor dari pihak lain. Serta peran orang tua yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak serta pengaruh orang tua untuk mendukung dan mendampingi anak agar terhindar dari kekerasan seksual yang tidak diinginkan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. [n.d.]. '3 PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK'



# Pertanggungjawaban Child Grooming ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id">jurnalmahasiswa.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ponorogoinvestigasi.blogspot.com">ponorogoinvestigasi.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
10	eprints.ui.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.unsur.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	<1 %
15	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
16	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	donnybu.com Internet Source	<1 %
20	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %

21	<a href="http://fh-unkris.com">fh-unkris.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://kiciki.blogspot.com">kiciki.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.unpad.ac.id">repository.unpad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.ptfarm.pl">www.ptfarm.pl</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://ejournal.uika-bogor.ac.id">ejournal.uika-bogor.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	Eko Noer Kristiyanto. "Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
31	Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, Agung Mafazi. "PORSTITUSI	<1 %

# ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA", Transparansi Hukum, 2019

Publication

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On